**Faktor-Faktor yang Memengaruhi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga**

**Wiwi Prapti Wulandari1\*, Cris Kuntadi2**

1 Politeknik STIA LAN Jakarta, Email: wiwi.wulandari@yahoo.co.id

2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

\* *Wiwi Prapti Wulandari*

***Abstract*:** This study aims to conduct a comprehensive literature review on the factors influencing the preparation of financial reports by Government Ministries/Agencies. The presentation of financial reports by government ministries/agencies is crucial to accountability and stakeholder trust. Numerous studies have been conducted to gain a deeper understanding of the factors affecting the preparation of these financial reports. This research utilizes a literature review method, gathering data through the exploration and analysis of journal articles and books and relevant theoretical sources related to policies issued by the government (agency), information technology, and human resource competence. This study is descriptive and conceptual, not involving empirical research or primary data analysis. It can provide a better understanding of the factors contributing to the preparation of financial reports, thereby assisting stakeholders, such as the government in policymaking, in producing high-quality financial reports. The analysis results indicate that government policies (agency), information technology, and human resource competence positively influence the preparation of Government Ministries/Agencies' Financial Reports, particularly on the quality of the generated reports.

***Keyowrds:*** *Competence, Financial Statements, Government Policies, Human Resources, and Information Technology*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur yang komprehensif tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Penyajian laporan keuangan oleh Kementerian Negara/Lembaga menjadi aspek penting dalam konteks akuntabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan. Untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan laporan keuangan tersebut, telah banyak dilakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan Metode *literature review*, data dikumpulkan melalui penelusuran dan analisis artikel-artikel jurnal, buku, serta sumber-sumber teoritis terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah *(agency)*, Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Penelitian ini bersifat deskriptif dan konseptual, tidak melibatkan penelitian empiris atau analisis data primer. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat membantu pihak-pihak terkait seperti pemerintah dalam membuat kebijakan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah *(agency)*, teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh positif terhadap penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, khususnya terhadap kualitas laporan yang dihasilkan.

**Keyword:** Kompetensi, Laporan Keuangan, Kebijakan Pemerintah, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi.

**Pendahuluan**

**Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan instansi pemerintah adalah bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola melalui mekanisme APBN/APBD (Juliani, 2018). Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi kepada pemangku kepentingan hingga publik pada umumnya. Tuntutan publik terhadap akuntabilitas publik memengaruhi manajemen institusi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, termasuk melalui laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menjadi kebutuhan transparansi dan syarat pendukung akuntabilitas dengan membuka akses informasi tentang pengelolaan sumber daya publik oleh pemerintah.

Pelaporan keuangan dana publik oleh Kementerian Negara/Lembaga menjadi landasan penting dalam menghadirkan informasi yang akurat dan transparan tentang penggunaan dana publik (Athifah et al., 2018). Hal ini menjadi sarana komunikasi utama kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, mengenai manajemen sumber daya finansial dari pajak dan dana publik lainnya. Pelaporan ini memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas kebijakan, efisiensi pengelolaan sumber daya dan dampak positif dari investasi pemerintah.

Dalam kaitannya dengan karakteristik kualitatif, laporan keuangan dana publik diukur berdasarkan persyaratan normatif yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Mencakup relevansi, andalitas, kemampuan dibandingkan dan kemudahan pemahaman, laporan keuangan menjadi alat evaluasi kinerja yang penting dan dasar bagi pengembangan teori dan kerangka kerja analitis oleh para pemangku kepentingan. Sehingga, komponen yang harus disertakan minimal mencakup jenis laporan keuangan dan elemen informasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Teriyani et al., 2022).

Dari hasil analisis terhadap laporan keuangan tersebut, memberikan wawasan tentang tren, tantangan, dan peluang dalam pengelolaan dana publik, yang kemudian dapat membentuk rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti pada penyusunan Rencana anggaran kedepannya.

Laporan keuangan juga menciptakan informasi lengkap tentang pengelolaan dana publik dan pencapaian tujuan pemerintah oleh Kementerian Negara/Lembaga. Informasi dalam laporan, seperti neraca, laporan operasional dan arus kas, memberikan landasan untuk pengambilan keputusan internal pemerintah dan transparansi yang memungkinkan publik mengawasi dan menilai kinerja lembaga pemerintah. Pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana publik menjadi dasar untuk memastikan pemanfaatan sumber daya finansial yang maksimal dan mendukung tujuan pembangunan pemerintah (Puspa & Prasetyo, 2020).

Sebagai badan publik yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik, Kementerian Negara/Lembaga diharapkan untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak hanya memenuhi persyaratan normatif tetapi juga memberikan gambaran transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pelaporan ini, pemerintah dapat memberikan informasi yang relevan dan andal kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang informasional dan berbasis fakta serta menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Sebagai respon terhadap pentingnya penyajian laporan keuangan dana publik oleh Kementerian Negara/Lembaga, banyak penelitian telah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Para peneliti atau akademisi tertarik untuk memahami lebih dalam bagaimana dinamika internal dan eksternal dapat memengaruhi penyusunan laporan keuangan, serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan atau menghambat akuntabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan sebagai akibat dari laporan keuangan yang disampaikan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Penelitian tersebut mencakup aspek-aspek seperti tata kelola keuangan, kebijakan pemerintah, tuntutan regulasi, dan kompleksitas struktur organisasi. Namun ada juga yang mengeksplorasi dampak teknologi informasi (Zubaidi et al., 2019), tingkat keterlibatan pemangku kepentingan (Widyakusuma & Faisal, 2022), serta tantangan yang dihadapi dalam mengelola sumber daya terbatas (Henny et al., 2021).

Hasil-hasil penelitian tersebut memberikan kontribusi wawasan mendalam tentang perbaikan yang dapat dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan. Rekomendasi-rekomendasi yang muncul dari penelitian tersebut dapat menjadi dasar bagi pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga audit, untuk meningkatkan kebijakan, prosedur dan praktik pengelolaan dana publik. Penelitian tersebut dapat mengungkapkan praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dengan rekomendasi yang diberikan, pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendukung perbaikan dalam pelaporan keuangan. Ini tidak hanya bermanfaat bagi pihak internal pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal yang mengandalkan informasi laporan keuangan untuk mengambil keputusan informasional dan berbasis fakta.

Melalui upaya berkelanjutan dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, terlihat peningkatan dalam keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami lebih jelas bagaimana dana publik dikelola oleh pemerintah. Tidak hanya itu, pemahaman tersebut turut berkontribusi pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan, dengan memberikan wawasan yang lebih baik mengenai dampak kebijakan keuangan dan manajemen dana terhadap hasil keuangan. Hasilnya, evaluasi kinerja organisasi dapat dilakukan secara holistik, memungkinkan identifikasi area yang memerlukan peningkatan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Dengan demikian, langkah-langkah ini membentuk dasar yang kokoh untuk tata kelola keuangan yang lebih baik, meningkatkan transparansi, dan memperkuat keberlanjutan keuangan organisasi.

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini guna membangun hipotesis untuk selanjutnya, yaitu:

**Rumusan Masalah**

Setelah menjabarkan latar belakang dari pengambilan judul penulisan ini, dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas untuk membangun hipotesis yang bisa digunakan pada riset selanjutnya, yaitu:

1. Apakah kebijakan pemerintah *(agency)* berpengaruh terhadap laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga?

2. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga?

3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga?

**Kajian Teori**

**Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Y)**

Laporan Keuangan Pemerintah atau dikenal dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Sugiharto, 2023).

Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami merupakan 4 kriteria Laporan keuangan yang disebut berkualitas (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Mulyana, 2010). Untuk itu dapat diartikan bahwa kualitas merupakan suatu penilaian terhadap *output* pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud. Pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik yang berasal dari pajak, retribusi, atau transaksi lainnya, merupakan laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya (Erniati, 2019).

**Kebijakan Pemerintah (x1)**

Teori Pemerintah *(Agency)* yang dijelaskan oleh Jenson dan Meckling (1976) adalah kerangka konseptual dalam ekonomi dan manajemen yang menitikberatkan pada hubungan keagenan antara prinsipal (pemilik aset atau pemegang kepentingan) dan agen (pihak yang bertindak atas nama prinsipal). Dalam sektor publik, teori ini diterapkan untuk memahami dinamika antara masyarakat atau pemerintah sebagai prinsipal dan entitas pemerintahan sebagai agen. Konsep utama Teori *Agency* adalah permasalahan keagenan yang timbul karena perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara keduanya (McColgan, 2001).

Lalu pada tahun 1976, Jensen dan Meckling kembali menyampaikan bahwa teori agensi mempertimbangkan konflik kepentingan antara pemilik (pemangku kepentingan) dan agen (manajemen). Dalam konteks Kementerian Negara/Lembaga, para pemangku kepentingan eksternal seperti masyarakat, investor, dan pemerintah dapat dianggap sebagai pemilik yang memiliki kepentingan untuk memastikan pengelolaan dana publik secara efektif. Keterlibatan mereka dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan.

Teori Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Theory*) juga menjadi dasar untuk memahami bagaimana keterlibatan pihak-pihak terkait dapat meningkatkan kualitas dan relevansi informasi dalam laporan keuangan (Laine et al., 2021). Dengan mendengarkan dan memahami kebutuhan pemangku kepentingan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menyusun laporan keuangan yang lebih informatif dan relevan.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, Teori *Agency* memberikan kontribusi krusial. Kontrak dianggap sebagai instrumen penting, dirancang untuk memberikan insentif kepada agen agar bertindak sesuai kepentingan prinsipal. Pemantauan dan pengendalian juga ditekankan, melibatkan laporan keuangan, audit dan mekanisme kontrol lainnya. Aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi fokus utama, dimana prinsipal perlu memastikan bahwa agen dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan mereka melalui pelaporan keuangan yang jelas dan transparan.

Dengan merujuk pada Teori *Agency*, pemerintah atau prinsipal dapat merancang sistem pengawasan, insentif dan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa entitas publik atau agen beroperasi sesuai dengan kepentingan masyarakat atau pihak berkepentingan lainnya. Sebaliknya, entitas publik atau agen perlu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan integritas dan transparansi penuh agar dapat memperoleh kepercayaan prinsipal. Dengan demikian, Teori *Agency* memberikan landasan bagi perancangan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik.

Keterkaitan antara kebijakan pemerintah dan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga merupakan hubungan erat dan kompleks. Kebijakan pemerintah memainkan peran kunci dalam membentuk kerangka kerja regulasi, standar akuntansi, dan prinsip-prinsip pengelolaan dana publik (Juliana, 2017). Dalam konteks regulasi fiskal dan anggaran, kebijakan pemerintah langsung memengaruhi penganggaran dan pengelolaan dana publik oleh Kementerian Negara/Lembaga, termasuk penetapan tarif pajak, alokasi anggaran, dan insentif fiskal.

Selanjutnya, kebijakan pemerintah menentukan standar akuntansi untuk lembaga pemerintah, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan serupa. Standar-standar ini menciptakan konsistensi dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah tercermin dalam alokasi dana publik dan proyek yang didanai oleh Kementerian Negara/Lembaga, tercermin dalam laporan keuangan melalui pengeluaran untuk program-program tertentu.

Pemerintah juga dapat mengimplementasikan kebijakan reformasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana publik, termasuk reformasi sistem akuntansi dan penggunaan teknologi informasi baru. Laporan keuangan mencerminkan implementasi kebijakan-kebijakan ini serta dampaknya pada transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan pemberian dana dan hibah pemerintah memengaruhi sumber daya keuangan Kementerian Negara/Lembaga, tercermin dalam laporan keuangan melalui penerimaan dan penggunaan dana tersebut.

Terakhir, kebijakan pemerintah terkait pengawasan dan akuntabilitas memiliki peran penting. Ini mencakup proses audit internal dan eksternal, serta pembentukan lembaga-lembaga pengawas. Laporan keuangan mencerminkan integritas dan keandalan kebijakan ini dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Pemahaman yang mendalam tentang kebijakan pemerintah menjadi krusial bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kualitas, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang disajikan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

**Teknologi Informasi (x2)**

Laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan, analisis, dan sistem informasi akuntansi yang memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan perusahaan. Dengan kemajuan teknologi, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penerapan teknologi dapat meningkatkan akurasi laporan keuangan dengan mengurangi kesalahan manusiawi. Sistem otomatis dapat menghitung dan merekam data dengan lebih tepat, mengurangi risiko kesalahan perhitungan atau pengetikan. Teknologi memungkinkan akses mudah dan verifikasi data keuangan oleh pihak terkait. Dengan sistem yang terintegrasi, informasi dapat diakses secara *real-time*, memastikan transparansi dalam pelaporan keuangan. Penggunaan teknologi mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Data dapat diolah lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan laporan.

Teknologi informasi adalah segala cara atau alat yang terintegrasi untuk mengumpulkan data, mengelola, mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya (Rahmawati, 2008). Teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan utama bagi organisasi untuk dapat memenuhi segala hal yang berkaitan dengan pelanggan dalam mendapatkan atau memberikan informasi. Teknologi informasi menawarkan kemudahan (seperti aksesibilitas, interaksi) kepada organisasi dan pelanggan.

Dari hasil studi *Literature Review* sebanyak 20 artikel terkait Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Ananda (2021), menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam menunjang bisnis parawisata efektif meningkatkan jumlah pariwisata.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan, dijelaskan bahwa untuk menjalankan proses pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan serta mendistribusikan informasi keuangan kepada layanan publik.

Penggunaan teknologi informasi dapat mendukung sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan. Meskipun laporan keuangan merupakan hasil karya sumber daya manusia di bidang akuntansi, pemanfaatan teknologi dapat mengurangi potensi kesalahan manusia.

Fariana et al (2021) menyelidiki pemanfaatan teknologi informasi, termasuk pengolahan data, informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi agar layanan publik mudah diakses dan ekonomis bagi masyarakat di seluruh wilayah. Pemrosesan data dengan bantuan komputer dapat meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan (Akhmad et al., 2017; Sudjiman & Sudjiman, 2018), sehingga optimalisasi teknologi informasi tersebut dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Dengan adanya sistem informasi keuangan yang terintegrasi, proses pencatatan transaksi keuangan dapat dilakukan secara otomatis dan lebih akurat, mengurangi potensi kesalahan manusia yang umumnya terjadi dalam pencatatan manual. Selain itu, penggunaan perangkat lunak akuntansi yang canggih juga memungkinkan pengguna untuk menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan mudah serta dapat melakukan analisis data yang lebih mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas Kementerian Negara/Lembaga atau Satker lainnya dalam pengelolaan keuangan, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan legitimasi kebijakan yang diambil.

**Kompetensi Sumber Daya (x3)**

Teori dasar tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melibatkan konsep bahwa kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap individu dalam suatu organisasi memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Kompetensi SDM merujuk pada kombinasi kualifikasi, pengalaman dan karakteristik pribadi yang membuat seseorang atau kelompok menjadi efektif dalam pekerjaan tertentu (McClelland, 1961).

Pendapat ahli Gary Dessler dalam bukunya "*Human Resource Management*" yang diterbitkan oleh Pearson pada tahun 2013 mencerminkan pemahaman mendalam tentang manajemen sumber daya manusia. Dalam karyanya ini, Dessler membahas secara komprehensif berbagai aspek terkait pengelolaan sumber daya manusia, dan salah satu fokusnya adalah konsep kompetensi sumber daya manusia. Buku ini mungkin membahas definisi, pengukuran dan penerapan kompetensi dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Dessler menjelaskan bagaimana pemahaman terhadap kompetensi sumber daya manusia dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Hal ini dapat mencakup strategi pengembangan kompetensi, identifikasi kebutuhan kompetensi, serta integrasi kompetensi dalam proses seleksi, pengembangan dan evaluasi karyawan (Dessler, 2013).

Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) merujuk pada ketrampilan dan kapabilitas individu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dalam organisasi. SDM yang terdidik, terlatih dan memiliki pengalaman yang memadai dapat berkontribusi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Pegawai dengan Kapasitas SDM yang tinggi akan memiliki pemahaman yang baik terhadap logika akuntansi. Mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman ini saat menyusun laporan keuangan, memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi dan peraturan yang berlaku serta bebas dari kesalahan penyajian. Selain itu, pengalaman juga memungkinkan SDM untuk bekerja dengan cepat, sehingga laporan keuangan dapat disiapkan tepat waktu dan memiliki kualitas yang baik.

Kompetensi sumber daya manusia dalam laporan keuangan memiliki peran yang signifikan. Ketika pegawai memiliki kemampuan di bidangnya, mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan (Saputra et al., n.d.). Dalam konteks ini, kompetensi sumber daya manusia mencerminkan kapasitas produktif sumber daya manusia, termasuk berbagai keterampilan seperti literasi, numerasi, kognitif, dan analitis, yang berkontribusi pada kualitas laporan keuangan (Andrianto & Rahmawati, 2018).

Kompetensi sumber daya manusia melibatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakter yang secara langsung memengaruhi kinerja bisnis. Kompetensi sumber daya manusia mencerminkan kapasitas produktif sumber daya manusia, termasuk berbagai keterampilan (literasi, numerasi, kognitif, dan analitis) untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Zubaidi et al., 2019).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan pemahaman yang diperlukan untuk mencapai kinerja dan menghasilkan keluaran baru (*output*), serta mencapai hasil-hasil yang diinginkan (*outcomes*). Menurut Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Nasional (Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, 2011), kompetensi diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, termasuk pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Hal ini bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil dapat menjalankan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

**Tabel 1**

**Penelitian terdahulu yang relevan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Penulis (tahun)** | **Hasil Riset Terdahulu** | **Persamaan dengan Artikel ini** | **Perbedaan dengan****Artikel ini** |
| **1** | Dewi et al., (2019) | *Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability* | Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah. | Sistem pengendalian internal sebagai variabel yang diteliti. |
| **2** | Wulyan, (2017) | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satker di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara) | Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga | Pada penelitian ini, menambahkan variabel Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi sebagai variabel yang diteliti selain kualitas SDM, dan Teknologi Informasi. Penelitian ini membahas tentang kualitas laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses penyusunan laporan keuangan, bukan variable-variabel yang mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan |
| **3** | Mutiana et al., (2017) | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satker Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara) | Teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia mempengaruhi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pada Satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga | Penelitian ini mengambil studi kasus di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Metode pengumpulan data menggunakan data primer, melalui kuisioner, bukan data sekunder. Penelitian ini membahas tentang kualitas laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses penyusunan laporan keuangan, bukan variable-variabel yang mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan |
| **4** | Juliana, (2017) | Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung) | Kebijakan pemerintah terkait dengan peningkatan akuntabilitas publik memainkan peran penting dalam membentuk pelaporan keuangan yang lebih baik.  | Penelitian ini juga mencari pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penelitian ini membahas tentang kualitas laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses penyusunan laporan keuangan, bukan variable-variabel yang mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan |
| **5** | Setiyowati & Kuntadi, (2023) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi, Sistempengendalian internal, dan keahlian personel berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan | Sumber Daya Manusia, dalam hal ini keahlian personal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan sama-sama menggunakan metode *literatur review*. | Komitmen organisasi, dan pengendalian internal tidak dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang kualitas laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses penyusunan laporan keuangan, , bukan variable-variabel yang mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan |
| **6** | Miftahani & Putri, (2022) | Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru *(Literature Review)* | Penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan dimana objek nya adalah kualitas Sumber Daya Manusia, dan akuntanbilitas. | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Pekanbaru, yaitu transparansi pada kualitas laporan pemerintah daerah di Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan SLR. Penelitian ini membahas tentang kualitas laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses penyusunan laporan keuangan, bukan variable-variabel yang mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. |
| **7** | Andrianto & Rahmawati, (2018) | Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman) | Kapasitas Sumber Daya Manusia,Pemanfaatan Teknologi Informasi telah menjadi objek penelitian yang sama atau merupakan faktor yang mempengaruhi Laporan Keuangan. | Studi empiris dilakukan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman). Penelitian ini membahas tentang kualitas laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses penyusunan laporan keuangan. Bukan variable-variabel yang mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. |
| **8** | Kuntadi et al, (2022) | Pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah | Dua Variabel x yang diteliti memiliki kesamaan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia, faktor yang mempengaruhi laporan keuangan. | Terdapat satu variable yang berbeda, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Penelitian ini membahas tentang kualitas laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses penyusunan laporan keuangan, bukan variable-variabel yang mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. |

**Metode**

 Metode yang digunakan penulis dalam kajian ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, dengan membaca, mencatat dan mengolah objek yang diteliti (Zed, 2023). Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari dasar untuk memperoleh dan membentuk landasan teori, kerangka berpikir dan menentukan hipotesis penelitian (Kartiningrum, 2015). Dalam penelitian ini sendiri data sekunder yang digunakan ialah penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan objek yang diteliti yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Dalam penelitian studi pustaka ada empat ciri utama yang harus perhatikan yaitu:

1. Penulis berhadapan dengan teks (*nash*) atau data angka, bukan dengan nara sumber di lapangan.

2. Data pustaka berasal dari sumber data yang ada di perpustakaan dan siap digunakan.

3. Pada umumnya data yang digunakan adalah data sekunder, yang artinya bukan data asli didapatkan dari lapangan secara langsung.

4. Data yang digunakan pada studi kepustakaan ini bersifat fleksibel dan tidak terbatas (Zed, 2023)

**Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan telaah teori dan penelitian terdahulu yang relevan, *literature review* ini difokuskan pada pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

1. **Pengaruh Kebijakan Pemerintahan (x1) terhadap Laporan Keuangan (y1)**

Pemerintah melalui kebijakan memiliki implikasi mendalam terhadap penyusunan dan manajemen laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai regulasi terkait, memberikan dasar hukum yang mengatur praktik keuangan sektor publik di Indonesia. Dalam kerangka teori kebijakan publik, Undang-Undang ini mencerminkan konsep akuntabilitas dan transparansi sebagai prinsip utama dalam mengelola keuangan pemerintah.

Teori kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini dapat dianalisis melalui konsep akuntabilitas publik yang menciptakan hubungan antara pemerintah sebagai penyedia layanan publik dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Konsep ini sejalan dengan penekanan pada akuntabilitas publik dalam penjelasan sebelumnya, yang menekankan pada peran pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana publik*.*

Seperti yang terdapat dalam jurnal akuntansi sektor publik, seperti *"Public Accountability and Financial Performance of Local Governments*" oleh Kluvers, (2003), artikel ini menyelidiki dampak akuntabilitas publik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, menyoroti keterkaitan antara tata kelola keuangan yang baik dan hasil keuangan yang positif.

Kebijakan Pemerintah memiliki peran sentral dalam membentuk dan mengawasi aspek-aspek kunci pengelolaan keuangan sektor publik. Kebijakan Akuntabilitas Publik menjadi instrumen yang signifikan, mengingat temuan penelitian Miftahani & Putri, (2022) yang menegaskan dampak positif kebijakan akuntabilitas publik terhadap laporan keuangan. Ini mencerminkan peran pemerintah dalam menciptakan kerangka kebijakan yang mendorong transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik.

Selain itu, Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) turut berperan sebagai aspek penting dalam tata kelola keuangan sektor publik. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Juliana (2017) tersebut menunjukkan kontribusi positif SPIP terhadap kualitas laporan keuangan. Ini menekankan bahwa kebijkan dan panduan dari pemerintah *(agency)* berperan dalam memastikan penerapan dan pemeliharaan SPIP di lembaga-lembaga pemerintah.

Regulasi Keuangan Pemerintah menjadi fokus lain dalam kaitannya dengan Kebijakan Pemerintah, di mana hasil penelitian yang menyatakan perlunya peningkatan pada faktor-faktor tertentu dalam SPIP memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengkaji dan memperbarui regulasi keuangan yang relevan. Keterlibatan pemerintah dalam mengakomodasi perubahan ini mencerminkan tanggung jawabnya untuk menciptakan kerangka regulasi yang responsif dan efektif.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah dan Undang-Undang yang mengatur laporan keuangan Kementerian Lembaga bukan hanya mencerminkan praktik akuntansi yang diperlukan, tetapi juga menciptakan landasan teoritis dan hukum untuk mencapai tujuan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan di sektor publik.

1. **Pengaruh Teknologi Informasi (x2) terhadap Laporan Keuangan (y1)**

Hubungan antara Teknologi Informasi (TI) dan Laporan Keuangan (LK) telah menjadi aspek penting dalam konteks modern pengelolaan keuangan (Kurniawan et al., 2023). Dengan kemajuan pesat teknologi, khususnya Teknologi Informasi, laporan keuangan tidak hanya sekadar dokumen statis, melainkan juga mencerminkan pemanfaatan TI dalam berbagai aspek (Saputra et al., 2023). Penggunaan TI dalam penyusunan laporan keuangan membawa dampak signifikan pada efisiensi, akurasi, dan keterbacaan informasi keuangan (Mutiana et al., 2017).

Pertama, TI memungkinkan otomatisasi proses akuntansi dan pelaporan keuangan (Kurniawan et al., 2023). Sistem akuntansi yang terintegrasi secara digital dapat mencatat transaksi dengan cepat dan akurat, mengurangi risiko kesalahan manusia dan memastikan bahwa data yang masuk ke dalam laporan keuangan adalah konsisten dan tepat waktu (Zamzami et al., 2021).

Kedua, teknologi informasi mendukung penggunaan analisis data dan kecerdasan buatan (AI) dalam menganalisis tren keuangan, memproyeksikan hasil masa depan, dan memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada pemangku kepentingan (Berdiyeva et al., 2021; Hasan, 2022).

Selain itu, TI juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Dengan adopsi teknologi *blockchain*, misalnya, integritas data keuangan dapat dijamin dan jejak audit yang tak terubah dapat diakses oleh pemangku kepentingan (Pratiwi, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Ali (2023) juga menghasilkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap laporan keuangan dalam pengambilan keputusan manajamen.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budiono et al (2018), Chodijah & Hidayah (2018), Mene et al (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan studi Satuan Kerja yang berbeda, hasil penelitian dari Sari et al., (2018) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, melalui aplikasi internal maupun aplikasi umum mampu mempercepat pengolahan data dan menjamin keakuratan serta kevalidan data, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas laporan keuangan satuan kerja vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan adanya hubungan yang semakin erat antara Teknologi Informasi dan Laporan Keuangan, penerapan teknologi ini menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi dan transparansi dalam menyajikan informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tantangan seperti keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi masih menjadi perhatian utama dalam implementasi TI dalam konteks laporan keuangan (Salsabila & Rahman, 2023). Oleh karena itu, manfaat dan risiko TI dalam laporan keuangan perlu dievaluasi secara cermat untuk memastikan bahwa implementasinya membawa nilai tambah dan keandalan informasi keuangan.

1. **Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia (SDM) (x3) terhadap Laporan Keuangan (y1)**

Aktivitas pelaporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan syarat kualitatif seperti yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada PP Nomor 71 tahun 2010, memerlukan sumber daya manusia yang memahami secara komprehensif akuntansi pemerintahan. Dalam hal ini sesuai dengan hasil regresi berganda yang dilakukan oleh Zubaidi et al (2019)**,** bahwa Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Ini membuktikan bahwa Kompetensi SDM yang baik akan menjadi faktor yang mempengaruhi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga dimana dengan kompetensi tersebut meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Kualitas laporan keuangan mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas baik menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Firmansyah et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Setiyowati & Kuntadi (2023) menyoroti aspek penting dari Sumber Daya Manusia, yakni keahlian personel yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan, yang berpengaruh terhadap akurasi, keterpercayaan, dan relevansi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung integritas dan profesionalisme dapat meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan perusahaan tersebut.

Hasil penelitian serupa yang dilakukan Andrianto & Rahmawati (2018) dengan sampel sebanyak 114 pengelola keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Sleman menunjukkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia di Satuan Kerja Perangkat Daerah Sleman berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan Henny et al (2021), bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia yang meliputi pengetahuan, keahlian serta perilaku atau *attitude* yang dimiliki seseorang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian tentang pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah juga telah dilakukan oleh Kuntadi dkk, (2022), hasil yang ditemukan juga memiliki korelasi positif dengan peneliti-penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan di atas. Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan faktor utama sebagai pengumpul data hingga pembuatan laporan keuangan. Kompetensi SDM mengacu pada kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh individu atau tim yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dalam suatu organisasi. Semakin tinggi tingkat kompetensi SDM, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kompetensi SDM dalam hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang standar akuntansi yang berlaku, kemampuan analisis data, keahlian dalam menggunakan perangkat lunak akuntansi, serta pemahaman yang baik tentang proses bisnis dan aktivitas organisasi yang dilaporkan.

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah kerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini;

Kebijakan Pemerintah (x1)

Teknologi Informasi (x2)

Kompetensi Sumber Daya Manusia (x3)

Laporan Keuangan (y1)

**Gambar 1**

Kerangka Konseptual

Jika dilihat dari kerangka konsep yang dijelakan pada gambar diatas, kebijakan pemerintah *(agency)*, Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia memberikan pengaruh positif terhadap penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, secara spesifik terhadap kualitas laporan yang dihasilkan. Selain variabel-variabel tersebut, beberapa hal yang juga memengaruhi penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, diantaranya adalah:

1. Peranan komite audit dan dewan pengawas: (Arum Ardianingsih et al., 2021; Lestari & Oktaviana, 2020; Pebriani, 2019).

2. Pelibatan Pihak Eksternal: (Fitri & Khotimah, 2022; Nugrahanti et al., 2023)

3. Kualitas Informasi Laporan Keuangan: (Handayani et al., 2022; Tahir et al., 2021; Zai et al., 2020).

4. Komitmen Organisasi: (Aziyah & Yanto, 2022; Murapi, 2020; Setiyowati & Kuntadi, 2023).

**Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keungan Kementerian Negara/Lembaga yang dinilai dari sisi kualitas laporan keuangan. Kemudian dari hasil kajian teori, artikel yang relevan dan pembahasan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintahan (x1) merupakan faktor yang berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (y1).

2. Penggunaan Teknologi informasi (x2) pada sistem keuangan merupakan faktor yang berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (y1).

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (x3) yang meliputi pengetahuan, keahlian serta perilaku atau *attitude* yang dimiliki seseorang sebagai pembuat atau penyusun laporan keuangan merupakan faktor yang juga berpengaruh dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (y1).

**Saran**

Setelah diperoleh kesimpulan atas penelitian ini, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi Laporan Keuangan Kementerian Lembaga, selain dari Kebijakan Pemerintah sebagai *agency*, Teknologi Informasi, dan Sumber Daya Manusia yang merujuk pada kompetensi, integritas, dan profesionalisme di Kementerian Negara/Lembaga, untuk itu masih perlu dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor terikat lainnya yang berpengaruh kepada Laporan Keuangan selain dari variable-variabel yang telah di teliti pada artikel ini. Faktor-faktor lain tersebut seperti Peranan komite audit dan dewan pengawas, Komitmen Organisasi, Pelibatan Pihak Eksternal, Kualitas Informasi Laporan Keuangan, Kompetensi SDM yang memadai dalam bidang akuntansi.

**References**

Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2017). Pengaruh pemanfaatan tekhnologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten enrekang. *Sosial Politik & Ekonomi*, *7*(1), 89–103.

Ananda, I. (2021). Pemanfaatan teknologi informasi pada desa wisata di Indonesia: A systematic literature review. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, *8*(4), 2291–2300. https://doi.org/https://doi.org/10.35957/jatisi.v8i4.1095

Andrianto, E., & Rahmawati, D. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja P. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, *6*(2).

Arum Ardianingsih, S. E., Acc, M., & CA, A. (2021). *Audit laporan keuangan*. Bumi Aksara.

Athifah, A., Bayinah, A. N., & Bahri, E. S. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur pada Yayasan PPPA Daarul Qur’an Nusantara. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, *2*(1), 54–74. https://doi.org/10.21070/perisai.v2i1.1496

Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. *Owner*, *6*(1), 977–989. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.686

Budiono, V. S., Muchlis, M., & Masri, I. (2018). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Pengalaman Kerja Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Depok). *Jurnal Wahana Akuntansi*, *13*(2), 110–128. https://doi.org/10.21009/wahana.13.022

Chodijah, S., & Hidayah, N. (2018). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus skpd provinsi dki jakarta). *Jurnal Tekun*, *8*(1), 34–48.

Dessler, G. (2013). Strategic human resource management and the HR scorecard. In *NJ, New*.

Dewi, N. F., Azam, S. M. F., & Yusof, S. K. M. (2019). Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. *Management Science Letters*, 1373–1384. https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.5.013

Erniati. (2019). *Laporan Keuangan Pemerintah Seagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara*. Berita. https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-seagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html

Fariana, R., Samsiyah, S., Hariawan, F., Arianto, B., & Sukamdani, Y. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Kedai Reny (Komunitas Penyandang Disabilitas Naeema Trenggalek). *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 100–108.

Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan dan Karakateristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, *4*(2), 181–197. https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180

Fitri, M., & Khotimah, H. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Keunis*, *10*(1), 1–12.

Handayani, F., Sari, D. M., & Yuniarti, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *11*(1), 9–20. https://doi.org/10.32639/jiak.v11i1.14

Henny, D., Rebecka, S. D., & Yanti, H. B. (2021). Kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, *21*(2), 227–244.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77–132). Gower.

Jenson, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Journal of financial economics* (Vol. 3, Issue 4).

Juliana, M. B. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung)*. Universitas Widyatama.

Juliani, H. (2018). Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, *1*(2), 149–164. https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.149-164

Kluvers, R. (2003). Accountability for Performance in Local Government. *Australian Journal of Public Administration*, *62*(1), 57–69. https://doi.org/10.1111/1467-8500.00314

Kuntadi, C., Saragi, J. E. M., & Syafira, S. I. (2022). Pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, *3*(5), 458–468. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jimt.v3i5.995

Laine, M., Tregidga, H., & Unerman, J. (2021). *Sustainability Accounting and Accountability* (3rd Editio). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003185611

Lestari, I. F., & Oktaviana, U. K. (2020). Peranan komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada BPRS di Jawa Timur). *El Dinar*, *8*(1), 29–36.

McClelland, D. C. (1961). *The achieving society.* D Van Nostrand Company. https://doi.org/10.1037/14359-000

McColgan, P. (2001). Agency theory and corporate governance: a review of the literature from a UK perspective [University of Strathclyde]. In *Department of Accounting & Finance, University of Strathclyde, Glasgow*. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32710879/agency\_theory-libre.pdf?1391169164=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAgency\_theory.pdf&Expires=1710011215&Signature=DqIlWYUgex4dBI3oIUrfYubxsDPa6qQOeJryc9VIOvMYUFC8CFIwt4OeC6f13~GwRAujHKts87a

Mene, R. E., Karamoy, H., & Warongan, J. D. . (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *GOING CONCERN : Jurnal Riset Akuntansi*, *13*(04). https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20045.2018

Miftahani, W., & Putri, A. M. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru (Literature Riview). *Research in Accounting Journal (RAJ)*, *2*(5), 690–697. https://doi.org/https://doi.org/10.37385/raj.v2i5.1604

Mulyana, I. (2010). *Manajemen dan kehidupan manusia*. Iman Mulyana. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Wcy1sDN0gZ0C&oi=fnd&pg=PA5&dq=Iman+Mulyana&ots=XTDZO9DU1e&sig=qEfgqeZPCCcDQ0Itv7ss85gt2Fc&redir\_esc=y#v=onepage&q=Iman Mulyana&f=false

Murapi, I. (2020). Pengaruh Sitem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, *1*(1), 1–9. https://doi.org/10.30812/rekan.v1i1.660

Mutiana, L., Diantimala, Y., & Zuraida, Z. (2017). Pengaruh Kompetensi, Pengendalian Intern Akuntansi, Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satker Vertikal Kementerian Kesehatan Wil Prov. DKI Jakarta). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *3*(2), 151–167. https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8228

Nugrahanti, T. P., Sudarmanto, E., Bakri, A. A., Susanto, E., & Male, S. R. (2023). Pengaruh Penerapan Teknologi Big Data, Independensi Auditor, dan Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Efektivitas Proses Audit. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(01), 47–54.

Pebriani, R. A. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuasin dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, *10*(1), 55–62. https://doi.org/10.36982/jiegmk.v10i1.744

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, Pub. L. No. Tidak Berlaku (2011).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. Aktif (2010). https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf

Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, *20*(2), 281–298. https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894

Rahmawati, D. (2008). Analisis Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, *5*(1).

Saputra, J. I., Hasan, A., & Rasuli, M. (n.d.). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengelolaan Aset Tetap dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Pemerintah Pro. *PEKBIS*, *12*(1).

Sari, R. Y., Oktavianto, H., & Sulistyo, H. W. (2018). *Pengaruh Kompetensi, Pengendalian Intern Akuntansi, Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satker Vertikal Kementerian Kesehatan Wil Prov. DKI Jakarta)*. *24*(3), 146–150. https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/269

Setiyowati, R. T., & Kuntadi, C. (2023). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan : Komitmen Organisasi , Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia*. *1*(3), 400–414. https://ciptakind-publisher.com/jumati/index.php/ojs/article/view/50

Sudjiman, P. E., & Sudjiman, L. S. (2018). Analisis sistem informasi manajemen berbasis komputer dalam proses pengambilan keputusan. *TeIKa*, *8*(2), 55–66.

Sugiharto. (2023). *Mengenal Lebih dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Republik Indonesia*. Artikel. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/16216/Mengenal-Lebih-Dalam-Laporan-Keuangan-Pemerintah-Pusat-Republik-Indonesia.html

Tahir, S. Y., Malia, E., & Faisol, I. A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa, dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)*, *1*(1), 20–29. https://doi.org/10.24929/jafis.v1i1.1203

Teriyani, T., Respati, N. W., & Fatimah, F. (2022). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga. *Global Financial Accounting Journal*, *6*(1), 108. https://doi.org/10.37253/gfa.v6i1.6534

Widyakusuma, S. V., & Faisal, F. (2022). Keterlibatan Pemangku Kepentingan Dalam Pelaporan Keberlanjutan Pada Perusahaan Pertambangan dan Energi di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, *11*(2).

Wulyan, D. (2017). Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Pengadilan Sewilayah Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, *2*(1), 1–20.

Zai, F. P., Purba, S., & Nainggolan, A. (2020). Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, *5*(1), 1–10.

Zubaidi, N., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. *International Journal of Social Science and Business*, *3*(2), 68–76.